

# RANCANGAN

## CATATAN RAPAT KERJA KOMISI III DPR RI DENGAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

### ----- (BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN)

Tahun Sidang	: 2017-2018
Masa Persidangan	: IV
Rapat ke	:
Sifat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Hari/tanggal	: Rabu, 14 Maret 2018.
Waktu	: Pukul 10.20 – 16.25 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi III DPR RI.

## KESIMPULAN/KEPUTUSAN

### I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Kapolri dibuka pukul 10.20 WIB dengan agenda rapat membahas mengenai :

- Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kapolri;
- Tindak Lanjut atas Pengaduan dan Kesimpulan Raker sebelumnya;
- Evaluasi Penegakan Hukum selama Tahun 2017 dan Program Prioritas;
- Sinergitas Polri dengan aparat penegak hukum lain dalam penanganan korupsi;
- Persiapan Polri dalam menghadapi Pilkada Tahun 2018;
- Pengungkapan kasus kasus aktual.

### II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. Beberapa hal yang disampaikan Komisi III DPR RI kepada Kapolri, diantaranya adalah sebagai berikut :

- Meminta penjelasan Kapolri terkait dengan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat yang disampaikan dalam Rapat Kerja sebelumnya dan tindak lanjut atas Kesimpulan dalam Rapat Kerja tersebut.
- Meminta penjelasan Kapolri terkait dengan evaluasi penegakan hukum sepanjang tahun 2017; target dan strategi yang akan dilakukan Polri dalam tahun 2018 serta penanganan perkara prioritas
- Meminta penjelasan Kapolri terkait dengan Sinergitas penegakan hokum terutama pemberantasan tindak pidana korupsi dengan aparat penegak hokum lainnya dalam kerangka *Integrated Criminal Justice System*.

- Meminta penjelasan Kapolri terkait dengan pelaksanaan Pilkada serentak 2018 yang akan datang, terutamanya mengenai :
  - a. Strategi dan langkah-langkah Polri dalam rangka persiapan pengamanan Pilkada tahun 2018 yang akan datang untuk mencegah terjadinya konflik horizontal agar dapat menciptakan Pilkada yang jujur, aman dan damai.
  - b. Sejauh mana Polri membentengi diri dalam menjaga netralitas Polri untuk menghadapi Pilkada serentak 2018 mengingat beberapa dari Calon Kepala Daerah merupakan Anggota Polri aktif.
- Meminta penjelasan Kapolri terkait dengan pengungkapan kasus-kasus aktual yang menjadi isu nasional yang menarik perhatian masyarakat yaitu :
  - a. Peredaran narkoba. Dijelaskan juga peta jalur-jalur yang menjadi pintu masuknya jalur peredaran narkoba dan perdagangan orang (*human trafficking*);
  - b. Tindak pidana korupsi;
  - c. Tindak pidana terorisme;
  - d. Pelanggaran hak asasi manusia; dan
  - e. Kasus-kasus aktual lainnya yang sedang ditangani oleh Polri.
- Meminta penjelasan terkait tentang tata niaga impor bawang putih, meminta agar satgas pangan turun tangan melakukan penyelidikan dalam tata niaga impor bawang putih karena ada indikasi kartel dimana bawang putih di impor sedikit demi sedikit, sehingga harganya naik. Bahwa saat ini ada surat persetujuan impor untuk mengimpor bawang putih untuk benih dan konsumsi. Atas pelanggaran ini penyidik PPNS Cuma mengenakan pelanggaran administrasi. Bahwa disinyalir terjadi praktek KKN di Kementerian Perdagangan karena seharusnya bawang putih dijual Rp. 10.000/kg tetapi dijual Rp. 40.000/kg, meminta satgas pangan Polri turun tangan.
- Meminta penjelasan terkait dengan pelanggaran perijinan impor jeruk dimana izin jeruk kino digunakan untuk mengimpor jeruk mandarin yang terjadi di pelabuhan Belawan, hal ini menimbulkan tanda tanya ada apa dengan Kementerian Perdagangan.
- Meminta penjelasan terkait dengan persoalan impor garam, bahwa seharusnya garam yang dibawah 95% tidak perlu diimpor karena masih bisa di produksi dalam negeri.
- Meminta penjelasan terkait dengan kinerja Polri dalam penanganan narkoba bisa sebaik BNN karena infra struktur Polri lebih lengkap.
- Meminta penjelasan terkait dengan humas Polri agar lebih aktif menyampaikan kepada masyarakat soal isu penyerangan terhadap tokoh agama
- Meminta penjelasan terkait dengan persoalan helikopter Polda Sumut yang digunakan untuk acara pernikahan, soal larangan mendengarkan musik saat berkendara, menanyakan keterkaitan MCA dengan Saracen, menanyakan kasus Briptu AR yang berseteru dengan kader Gerindra, menanyakan soal efektifitas babinkamtibmas, menanyakan kasus Novel Baswedan, menanyakan soal 171 pilkada serentak, meminta dipetakan daerah rawan konflik.
- Meminta penjelasan terkait dengan atensi dari Kepolisian terhadap penyelenggara pemilu terutama di daerah rawan seperti di Mimika, menanyakan soal pelepasan kembali pelaku kejahatan terhadap calon yang

- maju pilkada di Sinjai.
- Meminta penjelasan terkait dengan persoalan aliansi mahasiswa di Tuban yang berdemo menolak Presiden Jokowi dimana polisi menangkap para mahasiswa dan terjadi pemukulan padahal para mahasiswa tersebut sudah mengajukan ijin namun ketika mereka berjalan 2 km tanpa pengawalan dari Polri dan tiba tiba diserang polisi, hal ini merupakan preseden buruk dan jangan sampai terulang lagi dan Kapolres Tuban harus bertanggungjawab. Menanyakan soal tambang liar di Bojonegoro dan Tuban yang masih beroperasi sampai saat ini.
  - Meminta penjelasan terkait dengan tugas Polri dalam mengawasi pelaksanaan Peilukada guna tercapainya netralitas sampai ke tingkat bawah karena di sinyalir ada ketidaknetralan polri di tingkat polsek, meminta soal politik uang di berantas, menanyakan komitmen polri terkait pasangan yang ikut pilkada yang kena pidana, menanyakan soal hoax, menanyakan pertimbangan polri dalam menempatkan personilnya di tempat strategis dimana adapenempatan Kapolres yang tidak seagama dengan masyarakat sekitar sehingga mengganggu komunikasi antara Polri dan masyarakat.
  - Meminta penjelasan terkait dengan netralitas Polri dijamin dalam pilkada, meminta ada monitoring ke daerah daerah, bahwa pilkada serentak merupakan batu ujian untuk menghadapi pileg, menanyakan apakah MCA itu ada. Bahwa narkoba yang beredar bukan hanya bisnis semata namun bertujuan untuk menghancurkan bangsa terutama generasi muda, meminta diadakan kurikulum narkoba di sekolah dengan bekerjasama dengan Mendiknas.
  - Meminta penjelasan terkait dengan professional Polri, serta soal mutasi di tubuh Polri, dimana banyak anggota Polri yang berkeluh kesah kepada anggota Komisi III dan hal ini membuktikan adanya masalah didalam tubuh Polri, meminta agar reward dan punishment dijalankan dengan baik di kepolisian.
  - Meminta penjelasan terkait dengan persoalan MCA, meminta jangan menggunakan kata muslim untuk menyudutkan muslim karena ajaran Islam melarang menyebar fitnah dan hoax.
  - Meminta penjelasan terkait dengan kasus narkoba yang melibatkan 6 anak SMA dimana hanya 1 orang yang positif menggunakan narkoba tetapi yang di proses dua orang tanpa alasan yang jelas.
  - Meminta penjelasan terkait dengan kemampuan Polri dalam memberikan rasa aman bagi masyarakat, memberikan kesejahteraan dan keteladanan, meminta Polri tidak menggunakan kata muslim dalam kasus MCA, meminta agar Densus 88 mampu mengungkap jaringan orang-orang yang melakukan terror terhadap ulama.
  - Meminta penjelasan terkait dengan narkoba yang merupakan musuh Negara yang mengancam keamanan Negara karena menghancurkan generasi muda, seharusnya ada tindakan tegas terhadap Bandar narkoba, menanyakan soal penguasaan asing terhadap wilayah Indonesia seperti yang terjadi di Mentawai dan Lampung, menanyakan kasus asusila yang dilakukan kapolsek di Lampung
  - Meminta penjelasan terkait dengan tugas Polri dalam mewaspadaai peredaran narkoba di lapas di Bali, meminta Polri mencari dalang terror terhadap ulama.

- Meminta penjelasan terkait dengan persoalan pengawasan orang asing baik wisman maupun TKA yang turut memicu meningkatnya kejahatan narkoba, apa antisipasi Polri terhadap hal ini, menanyakan soal kebocoran data di Kominfo, apakah hal ini benar terjadi, menanyakan bagaimana system pembelajaran di Polri baik Sespim maupun PTIK, menanyakan markas Brimob di Jatim yang memprihatinkan.
  - Meminta agar para Polwan di Polri diperhatikan promosinya, dan meminta agar dibentuk Polsek di wilayah Batu Bara, Tanjung Balai dan Asahan, untuk mencegah masuknya narkoba.
  - Meminta penjelasan terkait dengan kasus korupsi kondensat dimana salah satu tersangkanya DPO, meminta agar korupsi sektor tambang di tangani karena nilainya cukup besar dan diduga ikut melibatkan aparat
  - Meminta penjelasan terkait dengan penangkapan kapal Equanimity di Tanjung Benoa, Bali,
  - Meminta penjelasan terkait dengan perkembangan kasus Sdr.Novel Baswedan
  - Meminta penjelasan terkait dengan kasus penyerangan terhadap ulama, meminta penjelasan terkait seorang briпка yang bisa mengeluarkan orang dari sel di Banjarmasin, menanyakan soal Muhammad Jeffry yang meninggal di penjara dalam kasus dugaan terorisme
  - Meminta agar jangan sampai kasus MCA dan penyerangan terhadap ulama menjadi konflik SARA, meminta Polair diberikan anggaran untuk memperbaiki sarana operasional, menanyakan soal perijinan yang dikeluarkan Presiden, seharusnya polisi dilibatkan dalam menyederhanakan perijinan.
  - Meminta adanya penindakan tegas terhadap penyebar hoax, menanyakan soal laporan Dirdik KPK terhadap penyidiknyanya, soal anggota polri yang menjadi penyidik KPK, soal hibah barang dari KPK kepada Polri, apakah sudah memenuhi ketentuan Menteri Keuangan.
2. Beberapa hal yang disampaikan oleh Kepala Kepolisian RI, diantaranya adalah sebagai berikut :
- Bahwa tindak lanjut atas pengaduan masyarakat yang disampaikan dalam Rapat Kerja tanggal 12 Oktober 2017 adalah sebagai berikut :
    - Surat pengaduan yang masuk berjumlah 91 surat dengan rincian :
      1. 3 surat tidak ada lampiran
      2. 23 surat tidak berkadar pengawasan
      3. 65 surat pengaduan yang di tindaklanjuti dengan status hasil tindak lanjut sebagai berikut :
        - a. 23 pengaduan tidak benar dan telah selesai, dikarenakan laporan atau pengaduan yang disampaikan tidak terbukti kebenarannya
        - b. 4 pengaduan benar dan telah selesai dikarenakan laporan atau pengaduan yang disampaikan pelapor terbukti kebenarannya
        - c. 38 pengaduan dalam proses/masih ditindaklanjuti
    - Bahwa Polri telah membuat Surat Telegram Nomor : STR/829/X/2017 tanggal 18 Oktober 2017 tentang Permintaan Bantuan Pengamanan dari aparat penegak hukum lain yang garis besarnya sebagai berikut :

- a) Permohonan bantuan pengamanan harus diajukan secara tertulis kepada pimpinan kewilayahan (Kapolda/Kapolres)
- b) Dalam hal mendesak, dapat meminta bantuan pengamanan secara lisan dan ditindaklanjuti dengan surat tertulis dalam waktu 1 x 24 jam
- c) Apabila surat permohonan ditujukan kepada Kapolres, maka Kapolres wajib melaporkan kepada Kapolda dan Kapolda melaporkan kepada Kapolri
- d) Apabila surat permohonan ditujukan kepada Kapolda maka Kapolda wajib melaporkan kepada Kapolri
- e) Permohonan bantuan pengamanan diberikan apabila sudah ada persetujuan
- f) Jumlah personil pengamanan yang akan diperbantukan disesuaikan dengan tingkat kerawanan yang dihadapi berdasarkan perkiraan intelijen
- g) Perlengkapan perorangan bagi personil yang akan diperbantukan tidak berlebihan dan tidak bertindak secara berlebihan/over acting
- Polri telah menyusun SOP tentang permintaan bantuan pengamanan dari aparat penegak hukum lainnya meliputi :
  - a) Membentuk kelompok kerja penyusunan SOP Permintaan bantuan dari aparat penegak hukum lainnya
  - b) Melaksanakan rapat internal dalam rangka penyusunan TOR
  - c) Melaksanakan rapat Pokja untuk menyusun Draft SOP pada tanggal 17 dan 18 Oktober 2017
  - d) Melaksanakan rapat koordinasi dengan satker terkait dalam rangka penyempurnaan draft SOP pada tanggal 6 dan 7 November 2017
  - e) Melaksanakan rapat koordinasi lanjutan dengan Satker terkait dalam rangka penyempurnaan draft SOP pada tanggal 10 dan 11 Januari 2018
- Polri telah menyusun rencana penguatan Direktorat Tindak Pidana Korupsi menjadi Densus Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi. Adapun penguatan tersebut meliputi pembentukan struktur organisasi yang baru, menyusun kebutuhan personil, anggaran dan sarana prasarana. Namun demikian berdasarkan, berdasarkan hasil Rapat Kabinet Terbatas yang dipimpin Presiden RI pada tanggal 24 Oktober 2017, dengan kesimpulan bahwa pembentukan Densus Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sementara waktu ditunda dimana Presiden memberikan arahan dan meminta Polri untuk melakukan pengkajian lebih mendalam terhadap rencana pembentukan Densus Pemberantasan TIPIKOR.
- Untuk menindaklanjuti arahan tersebut, Polri telah membentuk Pokja dan melaksanakan FGD yang melibatkan para pakar dan praktisi hukum dengan hasil sebagai berikut :
  - a) Telah disusun draft sistem rekrutmen penyidik Tipikor melalui open bidding dan assesment yang transparan
  - b) Telah disusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana serta anggaran untuk mendukung kegiatan Densus Pemberantasan Tipikor dengan rincian sebagai berikut :
    - 1) Belanja pegawai untuk 3.560 personil dari tingkat pusat dan kewilayahan sebesar sebesar Rp. 786.154.517.000,- Untuk

- memenuhi kebutuhan anggaran akan disesuaikan dengan jumlah personil dan kemampuan keuangan negara
- 2) Belanja barang untuk operasional kegiatan dari tingkat pusat dan kewilayahan sebesar Rp. 359.586.083.000,- telah dialokasikan dalam DIPA Polri T.A. 2018
  - 3) Belanja modal untuk memenuhi sarana dan prasarana dari tingkat pusat dan kewilayahan sebesar Rp. 240.910.992.000,- telah dialokasikan dalam DIPA Polri T.A. 2018. Untuk memenuhi selanjutnya akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara.
- c) Telah dikirimkan surat kepada Menteri PAN-RB Nomor B/1464/III/OTL.1.2.2./2018 tanggal 9 Maret 2018 perihal Penguatan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Polri salah satunya terkait pembentukan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disertai dengan naskah akademik terkait.
- Evaluasi penegakan hukum yang dilakukan Polri pada tahun 2017 mengalami penurunan 23%, dari 380.826 perkara pada tahun 2016 menjadi 291.748 perkara pada tahun 2017. Bahwa jumlah kejahatan konvensional pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 27%, kejahatan transnasional mengalami penurunan 5%, kejahatan terhadap kekayaan negara mengalami peningkatan 12%, dan kejahatan berimplikasi kontijensi mengalami peningkatan 16%. Sedangkan untuk penyelesaian kejahatan konvensional mengalami penurunan sebesar 23%, kejahatan transnasional mengalami penurunan 10%, kejahatan terhadap kekayaan negara mengalami penurunan 5% dan kejahatan berimplikasi kontijensi mengalami peningkatan 88%.
  - Tren penurunan angka kejahatan sepanjang tahun 2017 merupakan hasil dari upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh Polri yaitu :
    - 1) Penerapan strategi proactive policing melalui kegiatan deteksi dini, deteksi aksi, dan problem solving untuk mengantisipasi potensi kerawanan dan menyiapkan langkah antisipasinya, agar bisa langsung ditekan dan tidak berkembang menjadi gangguan kamtibmas
    - 2) Optimalisasi peran Bhabinkamtibmas yang berjumlah 47.226 orang dalam memberdayakan masyarakat untuk mencegah terjadinya kejahatan
    - 3) Penyampaian pesan kamtibmas melalui sarana media sosial, media cetak, media elektronik dan sebagainya agar masyarakat tidak menjadi pelaku atau korban kejahatan
    - 4) Penggelaran kekuatan polisi berseragam pada daerah-daerah rawan kejahatan, seperti penggelaran anggota staf dan operasional di pagi hari dan pada jam-jam rawan terjadinya kejahatan serta patroli dalam skala kecil maupun skala besar
    - 5) Optimalisasi kegiatan kepolisian yang ditingkatkan apabila terjadi peningkatan kualitas kejahatan pada suatu wilayah
    - 6) Pelaksanaan operasi kepolisian terhadap potensi gangguan kamtibmas
    - 7) Penegakan hukum secara profesional dan proporsional

- Target penegakan hukum Polri pada tahun 2018 adalah memprioritaskan kegiatan penegakan hukum terkait penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018 dan tahapan Pemilu Tahun 2019.
- Untuk mewujudkan hal tersebut, Polri akan melakukan penegakan hukum terhadap penyebaran isu SARA, ujaran kebencian, hoax melalui media sosial, kegiatan politik transaksional, tindak pidana di bidang pangan dan investasi, tindak pidana terorisme, tindak pidana narkoba, kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara dan kejahatan berimplikasi kontijensi, menyelesaikan tunggakan perkara, serta melaksanakan penegakan hukum terhadap perkara yang menjadi perhatian publik.
- Guna mewujudkan penegakan hukum yang akuntabel, proporsional dan profesional, Polri telah menyusun strategi penegakan hukum sebagai berikut :
  - 1) Memperkuat koordinasi dalam wadah Sentra Gakkumdu yang terdiri dari Bawaslu dan Kejaksaan dalam tindak pidana pemilihan
  - 2) Memperkuat kemampuan penyidik tindak pidana pemilihan agar mempunyai kecermatan dan ketaatan dalam pengungkapan tindak pidana pemilihan
  - 3) Melakukan penguatan Direktorat Siber melalui pembentukan Satgas Patroli Siber sebagai Subsatgas penegakan hukum dalam melakukan pengawasan terhadap penyebaran ujaran kebencian, hoax dan isu SARA melalui media sosial
  - 4) Menggelar operasi Kepolisian terpusat "Antimop 2018" dengan sasaran Tindak Pidana Politik Uang serta bekerjasama dengan Bawaslu, KPK dan Kejaksaan
  - 5) Mengoptimalkan kinerja Satgas Pangan dalam rangka menjamin stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan untuk menjaga tingkat inflasi
  - 6) Mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka peningkatan perekonomian nasional meliputi pemberantasan penyelundupan, mengoptimalkan Satgas Saber Pungli, Peningkatan PNBPN, koordinasi dengan stakeholders terkait untuk meningkatkan penerimaan cukai dan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi
  - 7) Memberikan petunjuk dan arahan dalam penanganan tindak pidana pemilihan dengan mengeluarkan 4 (empat) Surat Telegram mengenai arahan dan pedoman dalam Penyidikan terkait tindak pidana pemilihan
  - 8) Turut serta dalam pendampingan Alokasi Dana Desa (ADD) guna memastikan bahwa dana tersebut dimanfaatkan dengan tepat sehingga dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat di pedesaan
  - 9) Meningkatkan efektifitas penyidikan dengan membangun E-Manajemen Penyidikan
  - 10) Memprioritaskan penyelesaian kasus-kasus yang menjadi perhatian publik
- Sinergi antara Polri, Kejaksaan dan KPK dalam rangka pencegahan Tipidkor dilakukan melalui kegiatan :

1. Pelatihan bersama dalam rangka upaya pencegahan Tipidkor, seperti pelatihan penanganan Tipidkor dengan subjek hukum korporasi
  2. Sosialisasi dan asistensi terhadap kementerian/lembaga/ BUMN/ BUMD yang dilakukan bersama sama dengan KPK dan Kejaksaan
  3. Kampanye bersama anti korupsi
  4. Sosialisasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan peran serta masyarakat dalam pencegahan tindak pidana korupsi
- Untuk meningkatkan sinergi kerja sama dan koordinasi antara KPK-Kejaksaan-Polri dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, pada tanggal 29 Maret 2017 telah dilakukan penandatanganan nota kesepahaman tentang kerjasama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang berlaku selama 3 tahun sejak ditandatangani dengan ruang lingkup sebagai berikut :
    - a) Sinergi penanganan tindak pidana korupsi
    - b) Pembinaan aparaturnya penegak hukum
    - c) Bantuan narasumber/ahli, pengamanan dan sarana /prasarana
    - d) Permintaan data dan/atau informasi
    - e) Peningkatan dan pengembangan kapasitas kelembagaan serta SDM
  - Terkait Pilkada serentak, Polri telah memetakan kerawanan wilayah dengan mengacu pada 10 variabel sebagai indikator yaitu :
    - a) Profesionalisme penyelenggara pemilu
    - b) Sejarah konflik
    - c) Potensi konflik paslon
    - d) Konflik kepengurusan/internal parpol
    - e) Karakteristik masyarakat
    - f) Gangguan Kamtibmas
    - g) Kondisi geografis
    - h) Calon incumbent/petahana\
    - i) Profesionalisme Panwas
    - j) Profesionalisme pengamanan
  - Pengamanan Pilkada 2018 akan lebih mengedepankan pendekatan proactive preventive melalui kegiatan cipta kondisi yang diemban oleh fungsi intelijen, fungsi Humas dan fungsi Binmas
  - Untuk mengantisipasi permasalahan dan potensi kerawanan pilkada 2018, Polri menggelar operasi Mandiri Kewilayahan dengan sandi " Operasi Mantap Praja-2018" dengan tugas pokok " Pengamanan seluruh rangkaian kegiatan Pilkada serentak tahun 2018 dengan mengedepankan kegiatan preemtif, preventif dan didukung kegiatan penegakan hukum agar pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2018 berjalan dengan aman dan kondusif".
  - Dukungan anggaran pengamanan Pilkada serentak tahun 2018 dibebankan kepada APBD. Rencana kebutuhan anggaran Polri diajukan ke Pemda masing masing untuk mendapatkan persetujuan DPRD setempat. Total anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp. 3.179.315.479.875,- dan sampai dengan tanggal 8 Maret 2018 baru disetujui Rp. 2.054.304.747.240,- atau 64%.



- Untuk mengantisipasi terjadinya konflik sosial, Mabes Polri telah menyusun rencana Kontijensi dengan sandi Operasi Aman Nusa-I dengan jumlah personil 41.333 dari Korps Brimob.
- Polri memback up Polda Papua dalam menghadapi gangguan keamanan di Papua
- Polri membentuk satgas nusantara dalam rangka menghadapi pilkada, untuk mencegah money politics, hoax, sara dan lain-lain.
- Polri bekerjasama dengan KPK untuk mencegah terjadinya politik uang
- Polri melakukan joint investigation dengan KPK.
- Polri memiliki anggaran kontijensi sebesar Rp.300 milyar untuk pengamanan pilkada.
- Untuk menjaga netralitas, bahwa semua anggota Polri yang maju pilkada sudah pensiun dan jika misalnya yang bersangkutan tidak terpilih maka tidak bisa kembali ke Polri
- Polri telah mengeluarkan Surat Telegram Kapolri Nomor : ST/21/I/2018 tanggal 5 Januari 2018 tentang petunjuk dan arahan mekanisme pencalonan anggota Polri pada Pilkada serentak 2018. Polri juga telah menerbitkan Surat Telegram Kapolri Nomor : ST/15/I/2018 tanggal 16 Januari 2018 tentang petunjuk dan arahan dalam menjaga netralitas anggota Polri dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2018.
- Bahwa jumlah pengungkapan kasus narkoba yang ditangani Polri sepanjang tahun 2015 s.d. Februari 2018 berjumlah 141.798 kasus.
- Jalur yang menjadi pintu masuk peredaran narkoba adalah :
  - a) Aceh melalui pelabuhan Bireun, sungai Iyu Aceh Tamiang serta Pelabuhan Rakyat Langsa
  - b) Sumut melalui Bandara Kuala Namu, Pelabuhan Laut Belawan, Pelabuhan Teluk Nibung Tanjung Balai
  - c) Riau melalui Sungai Siak ke Pekan Baru dan Dumai
  - d) Kepulauan Riau melalui Pulau Karimun dan Tanjung Pinang
  - e) Bangka Belitung melalui Tanjung Api Api dan Tanjung Kalian
  - f) Jambi melalalui Pelabuhan Tanjung Jabung
  - g) Sumsel melalui Bandara Sultan Mahmud Badarudin II
  - h) DKI Jakarta melalui Bandara Soetta (dari Malaysia dan Hongkong), melalui Pelabuhan Tanjung Priok
  - i) Kaltim melalui Bandara Sepinggan dan Berau
  - j) Kaltara melalui Tarakan dan Pelabuhan Nunukan
  - k) Kalbar melalui Perbatasan Darat Entikong
  - l) Banten melalui Pesisir Pantai Barat Prop Banten
- Pada tanggal 8 November 2017, Dittipidnarkoba Bareskrim Polri berhasil mengungkap sindikat peredaran gelap narkoba jenis ekstasi sebanyak 600 ribu butir di Villa Mutiara Gading 2 di Bekasi dengan tersangka 4 orang
- Pada tanggal 1 Januari 2018, Polres Metro Jakbar telah berhasil mengungkap perkara narkoba jenis ganja jaringan antar provinsi sebanyak 1,3 Ton di Slipi, Jakbar.
- Pada tanggal 20 Februari 2018, Polri berhasil mengungkap upaya penyelundupan narkoba jenis sabu seberat 1,622 ton menggunakan jalur laut dari negara China.

- Jumlah pengungkapan kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang ditangani Polri dari tahun 2014 s.d. Februari 2018 berjumlah 539 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 758 orang.
- Penegakan hukum Tipikor yang ditangani Polri dari tahun 2015 s.d. Februari 2018 sebanyak 5.601 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 5.761 orang.
- Nilai kerugian negara dari kasus korupsi yang berhasil diungkap pada tahun 2016 berjumlah total Rp. 1.631.568.372.980,- (1,6 Trilyun). Dari jumlah ini, keuangan negara yang berhasil diselamatkan dalam proses penyidikan sebesar Rp. 176.915.001.057,- (Rp. 176,9 Milyar). Sedangkan sepanjang tahun 2017 sebesar Rp. 2.987.673.849.402 (2,98 Trilyun). Dari Jumlah tersebut, keuangan negara yang berhasil diselamatkan dalam proses penyidikan sebesar Rp. 1.887.603.913.226,- (Rp. 1,887 Trilyun).
- Polri berhasil mengungkap tindak pidana korupsi dalam pengelolaan kondensat oleh PT. TPPI senilai Rp. 39 Triliun dengan menetapkan 3 orang tersangka.
- Polri berhasil mengungkap dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas pembiayaan pemilikan kios pada Garut Super Blok dari Bank Jabar Banten Syariah kepada Debitur atas nama PT Hatsuka Sarana Karya yang mengakibatkan kerugian negara senilai Rp. 633,559 Milyar dengan tersangka 1 orang .
- Terkait tindak pidana terorisme, dari bulan Januari 2015 s.d. Februari 2018, Polri telah melakukan upaya penegakan hukum terhadap 441 orang pelaku dengan perincian 213 orang telah divonis pengadilan, 95 orang dalam proses persidangan, 58 orang dalam proses penyidikan, 16 orang dipulangkan karena tidak cukup bukti, 59 orang meninggal dunia (52 meninggal dalam penegakan hukum dan 7 orang meninggal bunuh diri dalam menjalankan aksi).
- Bahwa sampai saat ini tidak ada tindakan penyerangan sistematis terhadap para ulama. Bahwa penyerangan secara sistematis terhadap ulama hanya berita di media sosial yang belum terbukti kebenarannya, dan terdapat 32 kasus yang ternyata adalah berita tidak benar
- Bahwa Polri sudah mengeluarkan Surat Edaran, Telegram terkait netralitas Polri bahkan sampai dengan larangan untuk melakukan selfie dengan paslon. Bahwa setiap ada laporan pelanggaran maka irwasum dan propam akan turun langsung menindaklanjuti.
- Polri sudah mengeluarkan Surat Edaran untuk menunda proses hukum terhadap pasangan calon yang sudah ditetapkan oleh KPU dan KPUD kecuali OTT dan pelanggaran UU Pemilu. Penegakan hukum akan dilakukan ketika pemungutan suara telah selesai.
- MCA bukan berasal dari Polri tapi hasil dari investigasi, bahwa MCA berasal dari pengakuan para pelaku, bahwa apa yang disampaikan Polri adalah fakta yang ada di lapangan dan fakta-fakta ini akan digunakan di persidangan sehingga tidak mungkin dirubah.
- Penggunaan Frasa Muslim dalam MCA dimulai dari isu kriminalisasi ulama, penyerangan ulama, polri melakukan investigasi online dan ditemukan beberapa akun yang menamakan dirinya United Moslem Cyber Army, dimana konten dari akun-akun ini adalah hate speech yang

menimbulkan perpecahan akibat SARA. Bahwa terminologi muslim adalah murni penegakan hukum, bahwa pengungkapan MCA berasal dari penyelidikan yang mendalam. Soal polri yang dianggap tebang pilih, hal tersebut tidak benar, sudah ada 12 orang non muslim yang di proses karena melakukan penghinaan terhadap umat islam.

- Bahwa Polri sedang mencoba memperbaiki *bottle neck* dalam jabatan struktural di Polri dengan membuat jabatan fungsional
- Bahwa Polri telah bertindak tegas terhadap bandar narkoba dan narkoba ini dibuat oleh mafia bukan oleh negara.
- Bahwa satgas pangan pernah menandatangani harga bawang putih maximal 25 ribu, Polri akan mengefektifkan satgas pangan ini.
- Terkait Kapolsek di Lampung telah dicopot dan sedang diproses untuk PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat)
- Bahwa helikopter Polda Sumatera Utara tersebut tidak disewakan dan kepada pejabat yang bersangkutan telah di *grounded* dan ditarik ke Jakarta.
- Terkait dengan persoalan orang asing, UU No.6 tahun 2012 tentang Imigrasi tidak memberikan kewenangan terhadap Kepolisian untuk mengawasi orang asing. Polri bekerjasama dengan Dirjen Imigrasi dimana hal terkait eksekusi kejahatan yang dilakukan orang asing menjadi domain polri sedangkan administrasi orang asing menjadi domain imigrasi. Polri bekerjasama dengan Imigrasi sampai ke daerah.
- Terkait larangan menggunakan GPS, mendengarkan musik, bahwa hal ini sudah diluruskan dan tidak ada larangan.
- Bahwa terkait dengan persoalan korupsi yang nilainya kecil sebaiknya diberikan sanksi sosial, karena sanksi sosial lebih terasa efeknya, karena jika diproses akan memakan biaya yang lebih besar dari kejahatan korupsinya walaupun tidak bisa digeneralisir untuk semua kasus.
- Bahwa Polri akan berusaha mempromosikan polisi wanita di tubuh Polri dimana Wakpolda Kalimantan Barat seorang perempuan.
- Bahwa Tanjung Balai, Batu Bara dan Asahan akan menjadi perhatian Polri dan akan diperkuat pengawasannya
- Terkait dengan Korupsi kondensat, tersangka utamanya melarikan diri sehingga belum bisa dituntaskan, Kabareskrim akan mendalami kasus tambang.
- Bahwa penangkapan kapal Equanimity merupakan kerjasama Polri dan FBI, Polri hanya membantu permintaan FBI dalam rangka Police to Police Assistance
- Terkait dengan persoalan kasus Sdr. Novel Baswedan, sampai hari ini Polda metro telah membentuk 166 penyidik satgassus, dan diawasi oleh internal, dan eksternal seperti Kopolnas, Ombudsman, bekerjasama dengan penyidik KPK, telah diperiksa 68 saksi dan 91 toko kimia diperiksa. Bahwa penyidik Polda Metro Jaya terus bekerja dan ini hanya masalah waktu. Polri menggunakan metode deduktif dan induktif dalam kasus Novel. Bahwa Sdr. Novel sudah di BAP di Singapura.
- Terkait dengan laporan Dirdik KPK masih dalam proses.
- Bahwa pelaku penyerangan terhadap Sdr. Novel Baswedan ada 3 orang yang telah dibuatkan sketsanya. Polri juga telah melakukan audit

investigatif untuk mengetahui apakah apa yang dilakukan Polri sudah benar dalam menangani kasus Novel, bahwa Komnas HAM juga ikut melakukan investigasi

- Terkait dengan persoalan Sdr. Muhammad Jefry yang masuk DPO dalam kasus rencana pengeboman istana, telah ditangkap 4 orang, bom yang dibuat dari jenis Thorium yang dibuat dari video Bahrun Naim, Jefry ditangkap dan mengeluh sakit dan tidak lama meninggal dunia dan diketahui almarhum kena serangan jantung dan telah diperlihatkan kepada keluarga dan dibawa ke Tanggamus untuk dimakamkan.
  - Terkait dengan persoalan hibah dari KPK, prinsipnya Polri hanya menerima, prosesnya KPK yang bermohon kepada Menteri Keuangan untuk penyerahan aset. Keputusan Menkeu Nomor 721 Tahun 2017 merupakan landasan pemberian hibah kepada Polri.
  - Meminta agar Sarpras Polair anggarannya bisa ditambah
  - Terkait dengan soal penyidik di KPK, sudah di pensiunkan dari Polri sehingga sudah tidak ada masalah.
3. Komisi III DPR RI menyampaikan kepada Kapolri beberapa surat masuk dari masyarakat yang disampaikan kepada Komisi III DPR RI menyangkut permasalahan yang terkait dengan tugas dan wewenang Kapolri, untuk dapat ditindaklanjuti dan selanjutnya dapat disampaikan perkembangannya kepada Komisi III DPR RI pada Masa Sidang berikutnya.

### **III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

1. Komisi III DPR RI meminta Kapolri untuk menjunjung tinggi netralitas dan menjaga integritas Polri dalam menghadapi Pilkada serentak tahun 2018 dan memberikan sanksi terhadap anggota Polri yang melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis yang mencoreng institusi Polri.
2. Komisi III DPR RI mendesak Kapolri agar mempercepat penuntasan kasus-kasus yang meresahkan masyarakat serta kejahatan yang berimplikasi penyebaran isu SARA, ujaran kebencian, *hoax* melalui media sosial, kegiatan politik transaksional, tindak pidana di bidang pangan dan investasi, tindak pidana terorisme, tindak pidana narkoba, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara, serta kasus-kasus lainnya yang menarik perhatian masyarakat demi terciptanya rasa aman dan kepastian hukum di tengah masyarakat.
3. Komisi III DPR RI meminta Polri untuk terus-menerus bersinergi dengan penegak hukum lainnya dalam rangka meningkatkan kinerja Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi sehingga berjalan secara sinergis dan efektif.
4. Komisi III DPR RI mendesak Kapolri agar menindaklanjuti dugaan penyimpangan terhadap tata niaga pangan dan meminta Kapolri untuk memerintahkan Satuan Tugas (Satgas) Pangan agar segera menginvestigasi

oknum Kementerian dan Lembaga yang terlibat dalam praktek-praktek yang menyimpang terhadap peraturan tata niaga pangan.

#### **IV. PENUTUP**

Rapat ditutup pukul 16.25 WIB